

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teori**

Dalam sub bab deskripsi teori ini memaparkan berbagai landasan teori yang mendukung pelaksanaan penelitian ini, yaitu teori-teori mengenai Pendidikan Kejuruan, PKL, PSG, dan DU/DI. Deskripsi teori ini akan memberikan pemahaman yang lebih detail dan khusus mengenai topik-topik yang akan dibahas sehingga memudahkan dalam proses analisa pada bab selanjutnya.

#### **1. Pendidikan Kejuruan**

Pendidikan kejuruan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu. Pendidikan menengah kejuruan mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional. Sesuai dengan bentuknya, sekolah menengah kejuruan menyelenggarakan program-program pendidikan yang disesuaikan dengan jenis-jenis lapangan kerja (Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990). Seperti yang dikutip Yanto (2005: 12), pendidikan kejuruan menurut beberapa ahli yaitu: (a) Smith Sughes Act, pendidikan kejuruan adalah pendidikan khusus yang program-programnya dipilih untuk siapapun yang tertarik untuk mempersiapkan diri bekerja sendiri/bekerja sebagai bagian dari kelompok; (b) Ralph C. Wenrich, pendidikan kejuruan adalah bentuk pendidikan persiapan untuk bekerja yang dilakukan di sekolah menengah; (c) Thomas H. Arcy, pendidikan kejuruan adalah sebagai program-program pendidikan yang terorganisasi yang berhubungan langsung dengan persiapan individu untuk

bekerja mendapatkan upah ataupun bekerja tanpa upah atau persiapan tambahan mendapatkan upah ataupun bekerja tanpa upah ataupun persiapan tambahan suatu karir; (d) Bradley, Curtis H dan Friendenberg, pendidikan kejuruan adalah training atau retraining mengenai persiapan siswa dalam bentuk pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk dapat kerja dan memperbaharui keahlian serta pengembangan lanut dalam pekerjaan sebelum tingkat sarjana muda.

Huges sebagaimana dikutip oleh Soeharto (1988: 1) mengemukakan *vocational education* (pendidikan kejuruan) adalah pendidikan khusus yang program-programnya atau materi pelajarannya dipilih untuk siswapun yang tertarik untuk mempersiapkan diri bekerja sendiri, atau untuk bekerja sebagai bagian dari suatu grup kerja. Sejalan dengan pendapat tersebut Hamalik (1990: 24) mengemukakan pendidikan kejuruan adalah suatu bentuk pengembangan bakat, pendidikan dasar keterampilan dan kebiasaan-kebiasaan yang mengarah pada dunia kerja yang dipandang sebagai latihan keterampilan.

Menurut Hussain (2017: 844), pendidikan kejuruan merupakan salah satu jenis pekerjaan yang memungkinkan orang untuk mendalami bidang tertentu secara spesifik. Pendidikan tersebut meningkatkan keterampilan teknis dan keahlian dalam bidang teknologi, *skills* dan lainnya. Pendidikan kejuruan atau SMK juga merupakan salah satu bentuk stratan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Wenrich dan Galloway dalam Marfu'ah (2016: 2) mengemukakan bahwa pendidikan kejuruan dapat diartikan sebagai pendidikan yang spesial yang

berfungsi menyiapkan peserta didik untuk memasuki pekerjaan tertentu atau pekerjaan keluarga, atau untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja. Menurut Djatmiko (2013: 9-13), pendidikan kejuruan adalah pendidikan untuk produksi, melayani akhir dari sistem ekonomi dan dikatakan memiliki kelengkapan sosial. Pendidikan kejuruan adalah yang terbentuknya keterampilan, kecakapan, pengertian, perilaku, sikap, kebiasaan kerja, dan apresiasi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat dunia usaha/industri.

Karakteristik pendidikan kejuruan sangat kontras dengan pendidikan umum. Menurut Prosser dan Quigley (1950: 10) terdapat 5 (lima) karakteristik yang sekaligus menjadi faktor pembeda antara sekolah umum dengan sekolah kejuruan, sebagaimana disarikan pada tabel di bawah ini.

Tabel. 1 Karakteristik Pendidikan Kejuruan Dibandingkan dengan Pendidikan Umum

<b>Faktor Pembeda</b>	<b>Pendidikan Umum</b>	<b>Pendidikan Kejuruan</b>
Tujuan pengendalian	Mempersiapkan siswa untuk hidup secara lebih cerdas sebagai warga negara dan memahami dan menikmati hidupnya	Mempersiapkan siswa untuk bekerja secara lebih efisien
Materi yang diajarkan	Memberikan pelatihan mengenai informasi umum yang diperlukan sebagai latar belakang untuk kehidupan dan pelatihan dalam perangkat-perangkat umum pembelajaran yang diperlukan siswa untuk bekal belajar lebih lanjut mengenai kehidupan	Memberikan pelatihan khusus dalam hal keterampilan dan pengetahuan yang berguna untuk setiap pekerjaan tertentu
Kelompok yang dilayani	Melayani semua orang selama periode wajib belajar sampai SMA (usia 16-17 tahun), terlepas dari minat dan rencana yang bersifat kejuruan	Diberikan bagi mereka yang bersiap-siap untuk jenis pekerjaan tertentu atau telah bekerja di bidang tersebut
Metode pengajaran dan pembelajaran	Sangat menekankan pada apa yang dapat disebut metode membaca dan mengingat kembali ( <i>reciting</i> ). Membaca	Menggunakan pengalaman sebagai metode utama. Pengalaman dalam melakukan suatu pekerjaan untuk

Faktor Pembeda	Pendidikan Umum	Pendidikan Kejuruan
	untuk mendapatvan informasi dan <i>reciting</i> untuk menafsirkan serta menyimpannya di dalam ingatan	mengembangkan keterampilan dan dalam memikirkan kinerja dalam suatu pekerjaan, sehingga mendapatkan pemahaman dan inisiatif penuh dalam memecahkan masalah-masalah pekerjaan
Psikologi fundamental	Secara umum, muatan dan metode dalam pendidikan umum muncul saat pendidikan mengacu pada konsep psikologi umum mengenai kemampuan mental umum yang diyakini dapat berkembang baik dengan menguasai materi-materi tradisional yang disusun dan diajarkan sebagai disiplin ilmu formal	Merupakan dasar dari konsep psikologi bahwa benak ( <i>mind</i> ) merupakan suatu mesin pembentuk kebiasaan yang diajarkan melalui kebiasaan praktik dari tindakan dan pemikiran untuk mencapai tujuan yang diminati oleh pembelajar

Pendidikan kejuruan menurut Sudira (2009: 5) memiliki 3 (tiga) manfaat utama yaitu: (1) bagi peserta didik sebagai peningkatan kualitas diri, peningkatan peluang mendapatkan pekerjaan, peningkatan peluang wirausaha, peningkatan penghasilan, penyiapan bekal pendidikan lebih lanjut, penyiapan diri bermasyarakat, berbangsa, bernegara penyesuaian diri terhadap perubahan dan lingkungan; (2) bagi dunia kerja dapat memperoleh tenaga kerja berkualitas tinggi, meringankan biaya usaha, membantu memajukan dan mengembangkan usaha; dan (3) bagi masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan produktivitas nasional, meningkatkan penghasilan negara dan mengurangi pengangguran. Selain itu, menurut Tilak (2003: 32), pendidikan kejuruan memiliki keuntungan, yaitu menyerap keterampilan kerja yang relevan, yang dapat membuat pekerja lebih siap untuk pekerjaan tertentu dan lebih produktif.

Pendidikan kejuruan diselenggarakan atas dasar prinsip-prinsip tertentu yang merupakan ciri khas dari pendidikan kejuruan. Secara komprehensif prinsip pendidikan kejuruan disarikan oleh Charles Prosser (Wardiman, 1998: 38), yang dikenal dalam 16 prinsip pendidikan kejuruan, "*The Prosser's Sixteen Theorems on Vocational Philosophy*" yaitu:

- a. Pendidikan kejuruan akan efektif apabila lingkungan belajar dimana siswa dilatih merupakan replika lingkungan dimana nanti ia akan bekerja.
- b. Pendidikan kejuruan yang efektif hanya dapat diberikan dimana tugas-tugas dan latihan dilakukan dengan cara, alat dan mesin yang sama seperti yang diterapkan ditempat kerja.
- c. Pendidikan kejuruan akan efektif jika dalam melatih seseorang pada kebiasaan berpikir dan bekerja seperti yang dilakukan dalam pekerjaan itu sendiri.
- d. Pendidikan kejuruan akan efektif jika dia dapat memampukan setiap individu memedali minat, pengetahuan dan keterampilan pada tingkat yang lebih tinggi.
- e. Pendidikan kejuruan yang efektif untuk setiap potensi, jabatan atau pekerjaan hanya dapat diberikan kepada seseorang yang memerlukan, yang menginginkannya dan yang dapat untung darinya.
- f. Pendidikan kejuruan akan efektif jika pengalaman latihan untuk membentuk kebiasaan kerja dan kebiasaan berfikir yang benar diulangkan sehingga pas seperti yang diperlukan dalam pekerjaan nantinya.
- g. Pendidikan kejuruan akan efektif jika gurunya telah mempunyai pengalaman yang sukses dalam penerapan keterampilan dan pengetahuan pada operasi dan proses kerja yang akan dilakukan.

- h. Pada setiap jabatan ada kemampuan minimum yang harus dimiliki oleh seseorang agar dia tetap dapat bekerja pada jabatan tersebut.
- i. Pendidikan kejuruan harus memperhatikan permintaan pasar (memperhatikan tanda-tanda pasar kerja).
- j. Proses pembinaan kebiasaan yang efektif pada siswa akan tercapai jika pelatihan diberikan pada pekerjaan yang nyata.
- k. Sumber yang dapat dipercaya untuk mengetahui isi pelatihan pada suatu okupasi tertentu dari pengalaman para ahli pada okupasi tersebut.
- l. Setiap okupasi mempunyai ciri-ciri isi (*body of content*) yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya.
- m. Pendidikan kejuruan akan merupakan layanan sosial yang efisien jika sesuai dengan kebutuhan seseorang yang memang memerlukan dan memang paling efektif jika dilakukan lewat pendidikan kejuruan.
- n. Pendidikan kejuruan akan efisien jika metode yang digunakan ada hubungan pribadi dengan peserta didik mempertimbangkan sifat peserta didik.
- o. Administrasi pendidikan kejuruan akan efisien jika dilaksanakan secara fleksibel mengair secara alami.
- p. Pendidikan kejuruan memerlukan biaya tertentu dan jika tidak terpenuhi maka pendidikan kejuruan tidak boleh dipaksakan beroperasi.

Dari 16 prinsip pendidikan kejuruan “*The Prosser’s Sixteen Theorems on Vocational Philosophy*”, yang berhubungan dengan PKL adalah proses pembinaan kebiasaan yang efektif pada siswa akan tercapai jika pelatihan diberikan pada pekerjaan yang nyata, karena pada PKL dibutuhkan latihan pekerjaan yang nyata

agar nantinya dapat mempunyai keahlian profesional yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh DU/DI.

Menurut Fajar Hendra Utomo (2009: 9), tujuan SMK yaitu untuk mempersiapkan, memilih dan menempatkan calon tenaga kerja sesuai dengan tanda-tanda pasar kerja. Berdasarkan Kepmendikbud RI No. 080/u/1993 tentang kurikulum SMK, tujuan SMK adalah:

- a. Mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta pengembangan sikap profesional.
- b. Menyiapkan siswa agar mampu memilih karier, mampu berkompetensi dan mampu mengembangkan sikap profesional.
- c. Menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan dunia usaha dan industri pada saat ini maupun masa yang akan datang.
- d. Menyiapkan tamatan agar menjadi warga negara yang produktif, siap berkembang dan beradaptasi serta kreatif.

## **2. Praktik Kerja Lapangan**

Salah satu standar kompetensi kelulusan SMK adalah PKL, yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan disiplin kerja yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 323/U1997 bahwa PKL atau Prakerin adalah suatu program yang bersifat wajib yang merupakan bagian dari program (PSG) dalam pedoman praktis pelaksanaan PSG pada SMK disebutkan bahwa PKL adalah praktik keahlian produktif yang dilaksanakan di industri atau perusahaan yang berbentuk kegiatan mengerjakan pekerjaan produksi atau jasa. Praktik Industri

adalah praktik keahlian produktif yang dilaksanakan di industri/perusahaan yang kegiatannya berbentuk mengerjakan pekerjaan produksi/jasa (pekerjaan yang sungguh-sungguhnya) (Depdikbud,1997: 2).

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, menurut W.J.S Poerwodarmito, PKL adalah cara melakukan apa yang terdapat di dalam pelajaran teori. PKL merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan antara program pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja (*on the job training*) secara terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu (Daryanto, 2009: 109).

PKL merupakan pelatihan yang langsung dilakukan di tempat kerja dalam rangka mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran di sekolah dan dalam mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja (Slameto, 2006: 31). PKL merupakan pelatihan yang langsung dilakukan di tempat kerja dalam rangka mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran di sekolah dan dalam mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja (Slameto, 2006: 28). PKL berdampak positif terhadap motivasi belajar dan dapat menimbulkan semangat untuk belajar (Alma Buchori, 2002: 16).

PKL adalah proses pembelajaran di SMK yang memberikan pengalaman-pengalaman kepada siswa secara langsung di industri. PKL diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten dibidangnya sesuai standar kebutuhan lapangan kerja, oleh karena itu segala sesuatu yang berhubungan dengan perencanaan dan penyelenggaraan harus mengacu pada standar kemampuan



profesional kerja DU/DI. Menurut Putut Hargiyarto (2010: 62), kompetensi lulusan sesuai dengan yang diperlukan lapangan pekerjaan adalah hal yang sangat diharapkan oleh lembaga pendidikan. Akan tetapi karena perubahan kebutuhan tenaga kerja yang berjalan dengan sangat cepat, maka keinginan tersebut sulit tercapai, hal tersebut dikarenakan beragam kompetensi yang diperlukan oleh industri, sementara lembaga pendidikan hanya mampu menyelenggarakan sebagian saja. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, salah satu cara yang ditempuh adalah dengan menyelenggarakan kegiatan PKL. Dalam PKL, ada dua pihak yang aktif di dalamnya, yaitu *trainees* pihak yang dilatih dan *trainers* sebagai pihak yang melatih.

a. Tujuan PKL

Dalam PKL, siswa akan mempelajari kemampuan-kemampuan yang harus dikuasai di lapangan kerja. Siswa bekerja aktif sebagaimana layaknya karyawan dan bekerja sesuai dengan program kerja yang ditentukan. Dalam Buku Panduan Prakerin SMKN 3 Yogyakarta (2012: 1) SMKN 3 Yogyakarta mempunyai tujuan secara khusus dalam pelaksanaan prakerin sebagai berikut:

- 1) Memberikan pengalaman kerja yang sebenarnya bagi siswa.
- 2) Membentuk sikap kerja yang profesional bagi siswa.
- 3) Menambah ilmu pengetahuan dan teknologi dari DU/DI agar memperoleh target pendidikan "*Link and Match*".
- 4) Membangun pendekatan ke DU/DI untuk rekrutmen tenaga kerja baru.

Adapun tujuan dari pelaksanaan *on the job training* (Daryanto, 2009: 109), adalah:

- 1) Siswa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dunia kerja yang sesungguhnya.
- 2) Siswa memiliki tingkat kompetensi terstandar sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh dunia kerja.
- 3) Siswa menjadi tenaga kerja yang berwawasan mutu, ekonomi, bisnis, kewirausahaan dan produktif.
- 4) Siswa dapat menyerap secara nalar teknologi dan budaya kerja untuk kepentingan pengembangan dirinya.

Melalui program *on the job training* bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja agar siswa dapat menguasai kompetensi keahlian produktif terstandar, menginternalisasi sikap, nilai dan budaya instansi pasangan yang berorientasi pada standar mutu.

#### b. Pembimbingan PKL

Pada dasarnya PKL adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian kejuruan yang merupakan kerjasama antara pihak sekolah dengan dunia kerja. Maka dari itu program pendidikan tersebut menyangkut 2 (dua) tempat yaitu sekolah dan DU/DI. Mengingat penyelenggaraan program pendidikan PKL melibatkan pihak sekolah dan pihak dunia kerja, maka diperlukan guru pembimbing dalam sekolah dan pembimbing lapangan dari pihak dunia kerja secara khusus.

Guru pembimbing yang dimaksudkan adalah guru SMK yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing yang melakukan tugas dalam mempersiapkan, mengarahkan, memotivasi, melatih, menilai, membimbing siswa peserta program

pendidikan PKL dalam melaksanakan kegiatan komponen praktik dasar kejuruan dan praktik keahlian pada lini produksi di dunia kerja (Wardiman, 1998: 20). Guru pembimbing memonitoring siswa untuk memantau kinerja siswa dalam menjalankan tugasnya, sehingga guru pembimbing dapat membuat laporan kepada pihak sekolah. Selain itu evaluasi juga dilakukan antara guru pembimbing dan pembimbing lapangan dari pihak dunia kerja. Evaluasi atau penilaian hasil praktik di lapangan menurut Oemar Hamalik (2001: 254) meliputi beberapa hal, yaitu:

1) Evaluasi aspek pengetahuan

Evaluasi terhadap aspek pengetahuan bertujuan untuk mengetahui; (1) penguasaan siswa tentang pengenalan fakta-fakta; (2) tingkat pemahaman siswa mengenai konsep-konsep dan teori; (3) kemampuan siswa dalam penerapan prinsip-prinsip dalam materi pelatihan; (4) kemampuan siswa mengkaji (analisis) suatu masalah dan upaya pemecahannya; dan (5) kemampuan peserta mengenai kegiatan dan produk yang dihasilkan.

2) Evaluasi aspek keterampilan

Evaluasi dilakukan pada akhir pelatihan yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan keterampilan siswa.

3) Evaluasi aspek sikap

Sikap mengandung beberapa unsur yakni penghargaan, minat, disiplin, kesadaran dan watak.

c. Penilaian PKL

Penilaian siswa selama PKL sepenuhnya menjadi tanggungjawab dan wewenang pihak dunia kerja. Penilaian PKL juga dilakukan dengan memberikan

sertifikat kepada siswa peserta praktik kerja, yang menuai tentang kemampuan kejuruan apa yang telah dimiliki oleh pemegang sertifikat. Menurut Depdikbud (2005) secara garis besar dalam penilaian PKL didasarkan oleh 2 (dua) aspek yaitu aspek teknis dan non teknis, antara lain:

1) Aspek teknis

Aspek teknis meliputi penguasaan keterampilan siswa dalam menyelesaikan pekerjaan.

2) Aspek non teknis

a) Sikap dan perilaku siswa selaras dunia kerja

b) Disiplin dan tanggungjawab

c) Kreativitas

d) Kemandirian

e) Kerjasama maupun ketaatan

### **3. Pendidikan Sistem Ganda**

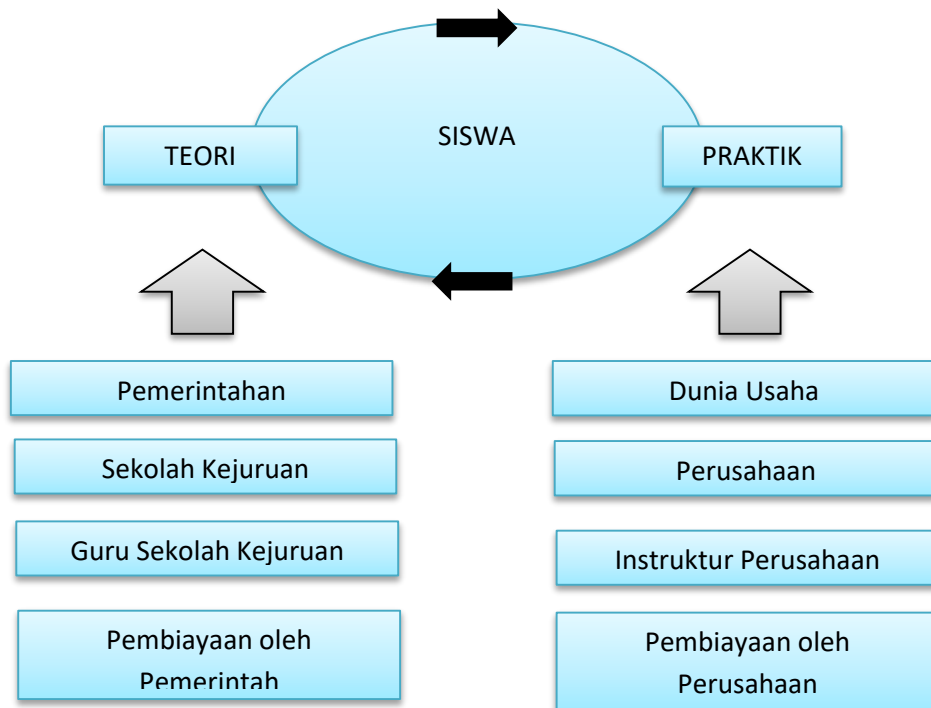
Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud, 1994: 7), PSG adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara sistematis dan sinkron program pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja, terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu. Menurut Wardiman Djojonegoro dalam Lilis Juliyanti (2013), PSG adalah suatu penyelenggaraan pendidikan yang mengintegrasikan secara tersistem kegiatan pendidikan (teori) di sekolah dengan kegiatan pendidikan (praktik) di industri.

Hal senada dikemukakan oleh Pakpahan (1994:13) yang menyatakan bahwa PSG merupakan suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian kejuruan yang memadukan secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di sekolah dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung pada bidang pekerjaan yang relevan, terarah untuk mencapai penguasaan kemampuan keahlian tertentu.

Permana (2005: 33) berpendapat bahwa PSG pada dasarnya merupakan suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara sistematis dan sinkron program pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja, terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu.

Sedangkan menurut Wena (1997: 30) mengatakan bahwa pemanfaatan dua lingkungan belajar di sekolah dan di luar sekolah dalam kegiatan proses pendidikan itulah yang disebut dengan program Pendidikan Sistem Ganda (PSG). Dari pengertian di atas, PSG mengandung beberapa pengertian, yaitu: (a) PSG terdiri dari gabungan subsistem pendidikan di sekolah dan subsistem pendidikan di dunia kerja/industri; (b) PSG merupakan program pendidikan yang secara khusus bergerak dalam penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional; (c) penyelenggaraan program pendidikan di sekolah dan dunia kerja/industri dipadukan secara sistematis dan sinkron, sehingga mampu mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan; (d) proses penyelenggaraan pendidikan di dunia kerja lebih ditekankan pada kegiatan bekerja sambil belajar (*learning by doing*) secara langsung pada keadaan yang nyata.

Dengan program PSG, siswa akan memiliki tingkat profesional yang sambung dengan dunia kerja yang dibutuhkan. Sebagaimana gambar diagram di bawah ini menunjukkan putaran program pembelajaran siswa yang terjadi di sekolah dan di industri.



Gambar 1. Interaksi antara Sekolah dan Industri melalui Para Siswa

Dalam pengertian di atas, berarti ada 2 (dua) pihak yaitu lembaga pendidikan (pelatihan) di sekolah dan lapangan kerja (industri/perusahaan) yang secara bersama-sama menyelenggarakan suatu program pendidikan dan pelatihan kejuruan. Kedua belah pihak secara sungguh berproses di dalamnya dengan segenap kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

Menurut Djojonegoro dalam Anwar (2002: 2), penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dengan pendekatan PSG bertujuan untuk:

- a) Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional, yaitu tenaga kerja yang memiliki tingkat pengetahuan, keterampilan dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja.
- b) Meningkatkan dan memperkuat keterkaitan dan kesepadanan/kecocokan (*link and match*) antara lembaga pendidikan dan pelatihan kejuruan dengan dunia kerja.
- c) Meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja berkualitas profesional dengan memanfaatkan sumber daya pelatihan yang ada di dunia kerja.
- d) Memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan.

Sebagai karakteristik pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dalam PSG diantaranya adalah pembagian tugas dan tanggungjawab antara sekolah dan dunia usaha/industri dalam aspek penyelenggaraan belajar mengajar, proses belajar mengajar di sekolah merupakan persiapan bagi siswa untuk dapat terjun/mengerjakan tugas di lapangan kerja dan kegiatan belajar di sekolah dan institusi pasangan merupakan kesatuan utuh dalam mencapai kompetensi siswa (Pakpahan, 1994: 15).

Adapun kegiatan yang perlu dilakukan agar pelaksanaan pendidikan sistem ganda berjalan dengan baik dan sistematis, yaitu (Depdikbud, 1994: 6):

- a) Menyusun program kerja yang jelas tentang rencana pendidikan sistem ganda, sebagai pegangan bagi SMK bersangkutan sekaligus sebagai bahan kajian serta pertimbangan pihak dunia usaha yang akan diajak bekerja sama.

- b) Memantapkan ikatan antara SMK dengan dunia usaha pasangannya, sehingga menjamin kelangsungan penyelenggaraan pendidikan sistem ganda.
- c) Menyusun program pengajaran bersama dengan dunia usaha pasangannya berdasar kurikulum yang berlaku.
- d) Menyiapkan tenaga yang akan terlibat dalam pendidikan sistem ganda khususnya tenaga pengajar, pelatih dunia kerja dan tenaga teknis lainnya.
- e) Melaksanakan pendidikan dengan sistem ganda sesuai dengan program yang telah dibuat.
- f) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan sistem ganda.
- g) Melaporkan proses dan hasil pelaksanaan pendidikan sistem ganda.

PSG merupakan upaya untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan siswa, sehingga diperlukan usaha dan perencanaan yang matang dan melibatkan kerjasama pihak sekolah dan pihak dunia usaha. Oleh karena itu, sistematis pelaksanaan pendidikan sistem ganda merupakan salah satu usaha memperlancar program tersebut. Dan berikut adalah komponen PSG di SMK yaitu peserta didik, kurikulum, tenaga kependidikan (Kepala Sekolah dan Guru/instruktur), proses pembelajaran di sekolah dan pelatihan kerja di industri (institusi pasangan), fasilitas/sarana dan prasarana pendidikan, penilaian hasil PSG, hubungan kerjasama dengan institusi pasangan dan proses pengelolaan PSG.

#### **4. Dunia Usaha dan Dunia Industri**

Tujuan dari sekolah kejuruan adalah untuk mencetak lulusan yang siap kerja, terampil dan berdaya asing. Dengan kata lain, sekolah kejuruan membekali siswanya dengan keterampilan agar setelah menyelesaikan pendidikan dapat



bersaing baik di DU/DI maupun sebagai wiraswasta. Kondisi objektif yang dapat kita amati tentang sistem pendidikan kejuruan di Indonesia selama ini yaitu banyak yang hanya mengejar target kelulusan 100% dan cenderung melupakan DU/DI sebagai salah satu “*user*” tamatan SMK. Oleh karena itu perlu adanya kerjasama antara sekolah dengan DU/DI dalam rangka peningkatan mutu tamatan agar lulusan SMK memiliki jaminan keterserapan di pasar kerja.

a. Peningkatan Kerjasama dengan DU/DI

Menurut Kuswana (2013: 34), bahwa seseorang dituntut memiliki kemampuan untuk bekerja sama dan berurusan dengan orang lain, atas dasar perpaduan kemampuan untuk bekerja sama dan berkomunikasi. Maka dari itu, SMK selayaknya melakukan pengembangan kemampuan untuk bekerja sama dan berkomunikasi dengan institusi pasangan dalam hal ini adalah DU/DI. Wujud kerjasama antara dunia pendidikan dengan DU/DI dapat melalui (1) perjanjian kesepahaman dalam hal penyerapan tenaga kerja dari sumber daya yang telah disediakan oleh SMK; (2) menyelaraskan dan mengembangkan komunikasi yang berkelanjutan terhadap kondisi dan perkembangan industri serta kebutuhan kompetensi industri agar dapat disesuaikan dengan program pendidikan di SMK, sehingga siswa memperoleh bekal yang cukup untuk dapat bersaing di dunia kerja; dan (3) melaksanakan program PKL bagi siswa di DU/DI. Dengan demikian, DU/DI mendapatkan tenaga kerja sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan.

Kerjasama penting untuk dilakukan, dikarenakan SMK adalah lembaga pendidikan kejuruan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja dan mengembangkan sikap profesional dalam bidang tertentu. Bagi

dunia usaha, sekolah dan siswa, kerjasama akan memberikan manfaat untuk mempunyai kesempatan lebih luas untuk membangun sebuah proses yang akan meminimalkan terjadinya ketidaksesuaian antara profil lulusan, kurikulum sekolah dan kualifikasi yang dibutuhkan oleh dunia kerja.

Menurut Mulyasa (2012: 148), tujuan membangun hubungan kerjasama sekolah dengan masyarakat dapat dilihat dua dimensi, yaitu:

- 1) Dimensi kepentingan sekolah yang meliputi memelihara kelangsungan hidup sekolah, meningkatkan mutu pendidikan, memperlancar kegiatan belajar mengajar dan memperoleh bantuan serta dukungan masyarakat dalam rangka pengembangan program-program sekolah
- 2) Dimensi kebutuhan masyarakat tujuan pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat adalah memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjamin relevansi program sekolah dengan kebutuhan masyarakat dan memperoleh anggota masyarakat yang terampil serta meningkatkan kemampuannya.

SMK sebagai lembaga pendidikan yang bertujuan menghasilkan SDM terampil dan siap kerja tentunya dibutuhkan kerjasama dengan pihak-pihak di luar sekolah (eksternal) dalam rangka menyelaraskan program sekolah melalui kerjasama dengan DU/DI. Kerjasama sekolah dapat dilakukan dengan lembaga pemerintah ataupun lembaga swasta, seperti perguruan tinggi, sekolah yang setara, DU/DI serta masyarakat. Untuk mengetahui keberhasilan pengembangan kerjasama, diperlukan adanya indikator yang dapat diukur. Indikator keberhasilan sekolah dalam menjalin kerjasama dengan DU/DI ditunjukkan dengan: (1)

terbentuknya tim kerja kehumasan yang mampu menjalin kerjasama dengan DU/DI; (2) terlaksananya penjajagan kerjasama dengan mitra yang terkait untuk memperoleh masukan sebelum pelaksanaan program; (3) terealisasinya kontrak kerjasama yang dituangkan dalam nota kesepahaman dengan pihak yang dijadikan mitra; dan (4) terealisasinya berbagai kegiatan dalam kerangka mensukseskan pelaksanaan program seperti pertukaran pelajar, guru, kepala sekolah serta pemagangan dalam upaya penambahan wawasan serta kompetensi (Depdiknas, 2009: 64). Melalui kerjasama kita dapat membangkitkan dan menghimpun tenaga secara bersama yang kemudian disebut sebagai *synergy* (Joyce dan Weil, dalam Hariyanto, 2010: 238).

#### b. Pelibatan DU/DI

Bagi para lulusan SMK, terdapat 2 (dua) *problem* yaitu sebelum dan sesudah bekerja. *Problem* sebelum bekerja berupa masalah mencari pekerjaan dan masalah menemukan pekerjaan yang cocok. Ruang lingkup pekerjaan jaman sekarang ini sangat luas dan banyak, sehingga lulusan perlu dibantu dalam menemukannya. Lalu *problem* kedua berupa setelah bekerja dimana pekerja akan dihadapkan pada persoalan-persoalan ketidakcocokan pekerjaan dengan yang ditekuni sekarang. Ketidakcocokan dapat terjadi pada aspek bakat dan kemampuan, penghasilan serta kondisi sosioemosional lingkungan pekerjaan (Thomas Sukardi & Putu Hargiyanto, 2007: 147). Oleh karena itu dalam penyelenggaraan SMK, pelibatan DU/DI selaku penyerap tenaga kerja sangat diperlukan.

Menurut Lilis Julianti (2013: 83), jika DU/DI tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran di SMK, maka akan berdampak pada:

- 1) Kemampuan/kompetensi praktis yang dimiliki instruktur dari institusi pasangan tidak dapat ditransfer kepada siswa sejak dini;
- 2) Sumber-sumber belajar yang hanya dimiliki oleh institusi pasangan tidak dapat dimanfaatkan oleh siswa;
- 3) Sekolah dan siswa tidak dapat menyerap kebutuhan kompetensi yang diharapkan institusi pasangan sebagai upaya meningkatkan relevansi lulusan.

Oleh karena itu, pelibatan peran DU/DI harus dilakukan secara optimal. Dimulai dengan:

- 1) Pelibatan peran DU/DI dalam pembimbingan pelaksanaan PKL

Pada saat pelaksanaan PKL, siswa dibimbing oleh instruktur lapangan atau pembimbing lapangan. Siswa diberikan arahan tentang kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa selama pelaksanaan PKL. Selain pembimbing lapangan, pembimbingan juga dilakukan oleh guru pembimbing. Peran guru pembimbing lebih bersifat normatif, karena guru pembimbing tidak memiliki peran memberikan pembelajaran/pelatihan kepada siswa selama pelaksanaan PKL. Proses pembimbingan juga berkaitan dengan penilaian siswa.

- 2) Pelibatan peran DU/DI dalam penilaian pelaksanaan PKL

Dalam penilaian terdapat beberapa aspek yang dinilai. Aspek komponen yang dinilai meliputi sikap (disiplin, tanggungjawab, kerjasama, kejujuran dan inisiatif) dan komponen produktif yang meliputi profil kemampuan dari masing-masing program keahlian yang diberikan oleh DU/DI.

## **B. Hasil Penelitian yang Relevan**

Berikut dapat disajikan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti, antara lain:

1. Penelitian oleh Adi Irwandi dan Sukirno (2016) dalam jurnalnya yang berjudul “Efektivitas Program Pendidikan Sistem Ganda (PSG) pada Dunia Usaha dan Dunia Industri Bidang Keahlian Akuntansi (Studi di SMK Negeri 1 Klaten)”. Penelitian ini mempunyai empat (4) tujuan yaitu mendiskripsikan pelaksanaan PSG pada DU/DI, mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan PSG, mengetahui faktor pendukung dan penghambat, mengetahui pola pelaksanaan PSG yang ideal DU/DI. Berdasarkan hasil dari penelitian maka disimpulkan bahwa (1) Pelaksanaan PSG pada DU/DI Jurusan Akuntansi SMK Negeri 1 Klaten ditinjau dari pelaksanaan seluruh komponen PSG pada umumnya sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan PSG yang tercantum dalam Kep. Mendikbud No.323/U/1997 maupun pedoman pelaksanaan PSG Dikmenjur 1997; (2) Efektivitas pelaksanaan program PSG pada DU/DI Jurusan Akuntansi SMK Negeri 1 Klaten ditinjau dari keterlaksanaan seluruh komponennya adalah Sangat Efektif dengan persentase keterlaksanaan 80,8%; (3) Faktor-faktor pendukung pelaksanaan program PSG pada DU/DI Jurusan Akuntansi SMK Negeri 1 Klaten, yaitu kesadaran dari siswa, fasilitas sekolah, kesadaran dari guru, dari segi pembiayaan dan adanya kerjasama/hubungan yang baik antara sekolah dengan DU/DI. Sedangkan faktor-faktor penghambat pelaksanaan program PSG pada DU/DI yaitu keterbatasan mencari DU/DI yang representatif serta adanya ketidaksesuaian pekerjaan yang diberikan

dengan kompetensi siswa, karakter siswa, dari segi biaya (perekonomian orang tua siswa) dan evaluasi antar SMK dengan DU/DI setelah pelaksanaan prakerin belum maksimal; dan (4) Pola pelaksanaan program PSG pada DU/DI Jurusan Akuntansi SMK Negeri 1 Klaten selama ini menerapkan model 1 yang diatur dengan *block release*. Ditinjau dari tempat dan peralatan kerja, ketersediaan instruktur, kontinuitas DU/DI, idealnya pelaksanaan program PSG pada DU/DI Jurusan Akuntansi SMK Negeri 1 Klaten perlu ditingkatkan pada pola pelaksanaan program PSG model 2.

2. Penelitian oleh Lilis Julianti (2013) yang berjudul “Peran DU/DI dalam Implementasi Pendidikan Sistem Ganda di SMK Negeri 1 Salatiga”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Proses PSG belum dapat berperan atau belum dilibatkan untuk berperan aktif dalam proses penyelenggaraan PSG, khususnya pada tahapan pengorganisasian program, penerimaan siswa baru, penyusunan kurikulum dan pembelajaran di sekolah. Sedangkan untuk pelaksanaan prakerin sudah melibatkan DU/DI meskipun hanya pada tahapan-tahapan tertentu; dan (2) Peran/partisipasi DU/DI selama ini masih terbatas pada kesediaan menerima siswa praktik, belum terlibat secara aktif dalam perencanaan/persiapan dan pengambilan keputusan menyangkut konsep dan prakarsa demi peningkatan penyelenggaraan pendidikan.
3. Penelitian oleh Siti Umi Khayatun Mardiyah dan Edy Supriyadi (2013) dalam jurnalnya yang berjudul “Evaluasi Praktik Kerja Industri Kompetensi Keahlian Pemasaran SMKN 1 Pengasih Kulon Progo”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi konteks dalam program pelaksanaan PKL adalah (1) Pendapat

guru pembimbing terhadap aspek konteks termasuk dalam kategori sangat relevan/sangat baik dengan presentase 100%. Hal ini menunjukkan bahwa menurut guru, program PKL telah direncanakan dengan sangat baik dan sangat relevan dengan kebutuhan siswa maupun DU/DI; (2) Pendapat siswa pada aspek konteks termasuk dalam kategori sangat relevan/sangat baik dengan presentase 70,7%. Hal ini berarti menurut siswa, perencanaan program PKL telah dilakukan dengan sangat baik oleh sekolah dengan mempertimbangkan relevansinya bagi kebutuhan siswa dengan sangat baik; (3) Pendapat pembimbing lapangan terhadap aspek konteks termasuk kategori sangat relevan/sangat baik dengan presentase 60%. Menurut pembimbing lapangan, perencanaan program PKL sudah sangat baik dan sangat relevan dengan kebutuhan siswa.

4. Penelitian oleh Dwi Anugerah, Daryati dan Rosmawita (2017) dalam jurnalnya yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Program Prakerin Berdasarkan Pedoman Prakerin di SMKN 3 Depok Program Keahlian Batu & Beton”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan PKL terhadap pedoman dan kendala yang terjadi pada pelaksanaan program PKL. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan (1) pelaksanaan persiapan PKL: penandatanganan MoU dalam kategori sangat baik (91%), pengajuan surat permohonan DU/DI kategori baik (86%), pembekalan PKL dalam kategori sangat baik (91%) untuk kategori panitia PKL dan kategori baik untuk siswa (84%); (2) pelaksanaan PKL berdasarkan angket siswa: kinerja siswa terdiri dari tugas dan kewajiban selama PKL masuk dalam kategori baik

(83%), kinerja pembimbing PKL dari sekolah dalam kategori cukup (75%), kinerja pembimbing dari DU/DI masuk dalam kategori cukup (75%); berdasarkan hasil wawancara dan analisis dokumentasi pada penerapannya kegiatan penilaian (evaluasi) berjalan sesuai dengan petunjuk pedoman dengan kategori baik.

Dari beberapa hasil penelitian yang relevan ini mendapatkan hasil bahwa sebagian DU/DI telah berperan dalam pelaksanaan program PKL dan sebagian DU/DI belum berperan dalam pelaksanaan program PKL.

### **C. Pertanyaan Penelitian**

Pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa tingkat peran DU/DI dalam pembimbingan PKL?
2. Seberapa tingkat peran DU/DI dalam penilaian PKL?